



WWF

POPULAR  
REPORT

HoB

2018

# MENIHILKAN BATAS UNTUK JANTUNG KALIMANTAN

21-23 NOVEMBER 2018

# TIM PENYUSUN

---

**Production Leader:**

Jimmy Syahirsyah

**Writer:**

Abroorza Ahmad Yusra

**Editor:**

Andi Fachrizal | Ismu Widjaya | Jimmy Syahirsyah |  
Lia Syafitri

**Design and Layout:**

Ageng Mulyono

**Photographer:**

Victor fidelis Sentosa

**Cover:**

Photo : © WWF-Indonesia / Victor Fidelis Sentosa

Bentang lahan pertanian dan pegunungan mewujudkan panorama hijau nan sejuk di Desa Lubuk Antuk.

**Published by :**

Published by WWF-Indonesia West Kalimantan Programme and WWF-Malaysia Sarawak Conservation Programme, in August 2018. Any reproduction in full or in part must mention the title and credit the above mentioned publisher as the copyright owner.



**PANDA SYMBOL**

©1986 WWF-World Wide Fund for Nature  
(Formerly World Wildlife Fund) ©WWF  
Registered trademark owner

***for a living planet***®

# DAFTAR ISI

---

JABAT ERAT PERJUMPAAN	01
DARI KEBUN KARET KE SAWAH NAN PERMAI	03
WORKSHOP: SALING TUKAR IDE DAN GAGASAN	06
BERBAGI KISAH DENGAN BUPATI	17
LANGKAH DI HADAPAN	22

---



Saat tiba di Desa Mentawit, peserta *Cross Border Green Economy Workshop* disambut dengan kemeriahan tabuhan rebana dan lantunan suka cita. Masyarakat dengan penuh antusias menyaksikan kunjungan peserta ke kebun karet.

# JABAT ERAT PERJUMPAAN

Satu per satu peserta *Green Economy and Ekowisata Cross Border Workshop* dari Sarawak keluar melalui pintu kedatangan Bandara Internasional Supadio Pontianak. Wajah mereka tampak lelah, namun melihat beberapa perwakilan WWF-Indonesia Kalimantan Barat menyambut, keceriaan kembali tampak. Yang disambut dan yang menyambut saling berjabat erat. Beberapa telah saling kenal. Yang baru bertemu, menyebutkan nama dan tersenyum akrab.

Tengah hari telah lewat sejam. Lebih dari dua puluh porsi makan siang telah dipesan di Restoran Ale-Ale. Segera saja, setelah rombongan lengkap, bis berwarna ungu mengangkut rombongan ke restoran. Usai melahap aneka makanan laut, dari kepiting, udang, hingga kerang, tenaga yang sempat terkuras kembali penuh.

Tanggal 21 November 2018, Rabu, ini memang istimewa. Dua puluh tiga orang dari Sarawak tiba di Pontianak untuk keesokan harinya melawat ke Tepuai, Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuannya, menghadiri diskusi lintas batas mengenai pengelolaan ekonomi berkelanjutan dan pengembangan ekowisata. Latar belakang status peserta berbeda-beda. Ada yang dari WWF-Malaysia Sarawak, perwakilan kerajaan (pemerintah), *district office* (setara dengan kecamatan), maupun masyarakat lokal. Dua orang dari WWF-Malaysia Sarawak telah terlebih dulu tiba di Putussibau, Kapuas Hulu, untuk membantu persiapan. Dua puluh satu yang lainnya, akan terbang dari menyambung perjalanan di tanggal 22. Tanggal 21 di Pontianak ini hanya ada agenda *free and easy*.

*Green Economy and Ekowisata Cross Border Workshop* sudah dicanangkan sejak bulan Agustus, ketika beberapa rombongan dari WWF-Indonesia Kalimantan Barat, perwakilan pemerintah daerah Kapuas Hulu, dan beberapa kepala desa di KSK Agropolitan Kapuas Hulu berkunjung ke beberapa kampung di Sarawak. Hanya saja, diskusi pada bulan Agustus tersebut masih dinilai belum mumpuni untuk menggali gagasan-gagasan terbaik. Sebab itu, kali ini, walau hanya tiga hari, konsep kegiatan menitikberatkan pada diskusi dan workshop antarpihak untuk menggali potensi dan permasalahan terkait pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan ekowisata.

Diskusi lintas batas ini didukung oleh program IKI yang memang menasar kawasan Heart of Borneo (HoB). Sebagaimana diketahui, luasan HoB adalah sekitar 22 juta hektar, melingkupi Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Area kerja program IKI yang dijalankan oleh WWF-Malaysia Sarawak dan WWF-Indonesia Kalimantan Barat, mencakup sekitar 2 juta hektar.

Terutama kegiatan green economy di Kalimantan Barat, Indonesia, program IKI dilaksanakan di Kawasan Startegis Kabupaten (KSK) Agropolitan yang mencakup tujuh kecamatan. Kecamatan Hulu Gurung merupakan salah satu dari tujuh kecamatan tersebut. Pertimbangan pemilihan Hulu Gurung sebagai tuan rumah pelaksanaan diskusi adalah karena di kecamatan tersebut terdapat beberapa desa yang sedang mengembangkan *internal control system* binaan WWF-Indonesia. Hal ini sesuai dengan semangat green economy yang digalakkan di dalam workshop lintas batas.

Selama satu malam di Pontianak, peserta diajak ke beberapa lokasi wisata yang ada. Ke tugu khatulistiwa maupun alun-alun. Sebagian ada yang memilih ke pusat pembelanjaan untuk mencari buku. Elvis Anak Didit, dari District Office Kapit, misalnya, menggemari mengoleksi buku-buku yang berkaitan dengan politik, hukum, dan adat. “Indonesia lebih kaya tentang adat dan hukum. Banyak yang bisa dipelajari di sini”, tuturnya.

Tanggal 22, sejak pagi, peserta terbang ke Putussibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu. Selama satu jam lebih lima belas menit mereka mengudara di maskapai NAM Air. Tiba di Putussibau, sambutan istimewa diterima. Pihak pemerintah daerah Kapuas Hulu, diwakili oleh Bappeda, menyambut di ruang penyambutan VIP. Hal ini menjadi permulaan positif dalam memulai kerja sama yang intens antar kedua negara menyangkut green economy maupun ekowisata, selayaknya yang diharapkan.

Jimmy Syahirsyah (tengah) dan beberapa perwakilan WWF-Indonesia Kalimantan Barat menyambut rombongan *Cross Border Workshop* saat tiba di Bandara Supadio, Pontianak, pada Rabu 21 November 2018.



© WWF-Indonesia / Victor fidelis Sentosa

Suliman (berbaju biru) dari Jabatan Hutan Sarawak sekaligus mewakili rombongan *Cross Border Wokrshop*, menyerahkan cendera mata kepada H. Abang M. Nasir, Kepala Bappeda Kapuas Hulu, tak lama setelah peserta tiba di Bandara Pangsuma, Putussibau, Kamis, 22 November 2018.



© WWF-Indonesia / Victor fidelis Sentosa

# DARI KEBUN KARET KE SAWAH NAN PERMAI

Mardiono tampak agak gugup. Kepala Desa Mentawit tersebut berusaha memperbaiki posisi berdirinya, agar kekakuannya berkurang. Tetapi suaranya masih terdengar sayup. Apalagi suara-suara warga yang berkerumun di jalan cukup mendengung. Siapapun yang hendak mendengarkan penjelasan Mardiono terpaksa harus lebih mendekat, atau memfungsikan kedua telinga baik-baik.

“Masyarakat Hulu Gurung, hampir seluruhnya memiliki kebun karet. Saya pikir, sekitar 75 persen jumlahnya. Untuk Desa Mentawit, semua (orang) memiliki (kebun karet).”

Lambat laun, kepercayaan diri Mardiono meningkat. Suaranya lebih nyaring dari sebelumnya, meski masih harus berlomba dengan riuh kerumunan masyarakat. Separuh warga Desa Mentawit turun untuk menyaksikan kedatangan rombongan *Cross Border Workshop* ini. Kunjungan lapangan ke kebun karet sudah menyerupai hajatan pesta.

“Adanya pendampingan WWF, membuat masyarakat menjadi lebih tahu bagaimana sistem kelola karet, dari produksi hingga pemasaran”.

Penjelasan Mardiono kemudian diteruskan oleh beberapa warga yang menjadi pengurus kelompok *Internal Control System* (ICS) kebun karet Desa Mentawit. Mereka adalah Abu Bakar koordinator kelompok ICS, Yurrmansyah inspektur lapangan ICS, dan Rusda sekretaris ICS.

Abu Bakar memaparkan bahwa kegiatan ICS di Desa Mentawit masih berjalan di tahap awal. Baru pada pembentukan kelompok. Diskusi tentang bagaimana memproses karet yang berkualitas baik serta mampu memiliki nilai jual baru berlangsung beberapa kali. Namun, mereka cukup percaya diri terhadap kesempatan untuk mengembangkan karet.

Rusda tanpa keraguan menjelaskan tentang hasil-hasil karet. Karet sudah bisa dijual setelah seminggu ditoreh. “Kalau bokar lama, memang tampak kecoklatan. Tetapi tidak masalah, karena kualitas di dalamnya, tetap bagus”, terangnya.

Yurrmansyah mendemonstrasikan teknik menoreh. Dengan cekatan ia menarik kulit pokok karet sambil pula menjelaskan bahwa menoreh yang baik adalah dengan tidak melukai terlalu dalam, tidak pula terlalu dangkal.

Peserta *Cross Border Workshop* dari Sarawak Malaysia menyimak dengan penuh minat. Mereka baru tiba di Tepuai, Hulu Gurung, pukul satu, setelah menempuh perjalanan udara dari Pontianak, dilanjutkan perjalanan selama tiga jam dari Putussibau. Sekarang, setelah makan siang, mereka langsung harus mengikuti agenda *field trip* ke Desa Mentawit dan Desa Lubuk Antuk. Walau begitu, tidak ada keluhan kelelahan. Yang terpancar hanyalah semangat dan keceriaan.

Di Desa Mentawit, diskusi berlangsung dua arah. Beberapa peserta *Cross Border Workshop* mengajukan pertanyaan. Mereka menggunakan bahasa Melayu dialek Malaysia. Yang menjawab menggunakan bahasa Indonesia. Tidak terjadi kendala. Terpenting, masing-masing mengerti apa yang ditanya apa yang dijawab.

Misalnya, Elvis dari Kapit District Office bertanya tentang berapa rata-rata jumlah pohon yang dimiliki masyarakat dan berapa jumlah pohon maksimal yang bisa ditoreh. Yurmansyah menjelaskan bahwa untuk 1 hektar lahan biasanya terdapat 400 pohon. Masyarakat mampu menghasilkan sekitar 10 kilogram karet per harinya, dengan estimasi mampu menoreh 300 pohon.

Setelah satu setengah jam, rombongan mengunjungi embung (dam) dan lahan pertanian Desa Lubuk Antuk. Sebelum meninggalkan Desa Mentawit, tidak lupa rombongan menyalami dan berfoto bersama dengan beberapa masyarakat yang sedari awal menyaksikan kegiatan dari tepi jalan.

Jarak Desa Mentawit ke Desa Lubuk Antuk menguras waktu sekitar setengah jam. Rinai hujan membasahi kap tujuh mobil yang membawa rombongan. Tiba di Desa Lubuk Antuk, rombongan langsung diarahkan ke lahan pertanian. Mobil terpaksa ditinggalkan di tepi jalan. Lokasi embung hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki atau sepeda motor. Beberapa warga Desa Lubuk Antuk yang menyambut rombongan dengan senang hati membonceng peserta rombongan menuju embung. Dengan sepeda motor, waktu tempuh dapat dipangkas menjadi sekitar 10 menit. Sepanjang perjalanan ke embung, peserta disuguhi pemandangan hamparan sawah nan hijau, menyegarkan imajinasi masa kecil tentang desa nan indah.

Embung Desa Lubuk Antuk menjadi puncak keindahan Lubuk Antuk. Embung tersebut berada di dataran yang lebih tinggi ketimbang sawah. Bukit hutan yang lebat langsung menjadi pembatas embung. Tampak jelas air yang jernih turun dari bukit hutan, mengisi embung. Suasana damai dan nyaman merangkul seluruh peserta rombongan. Apalagi saat itu hujan baru selesai turun dan kabut tipis menyelimuti puncak bukit. Petang itu sungguh menyegarkan jiwa alami setiap orang.

Di embung, Kepala Desa Lubuk Antuk, Hardianto, sudah menunggu. Di hadapan para peserta rombongan, Hardianto menjelaskan berbagai hal tentang Lubuk Antuk, terutama tentang kemajuan pertanian desanya dalam beberapa tahun terakhir.

“Embung desa ini berfungsi untuk menjaga debit air. Jadi, walaupun musim kemarau, sawah tetap bisa diairi. Berbeda dengan sebelum ada embung. Satu minggu saja tidak hujan, lahan langsung kering,” tutur Hardianto.

Tanya jawab lalu berlangsung. Banyak hal yang menarik peserta dari lawatan ke embung Desa Lubuk Antuk ini. Mereka kagum bahwa lahan untuk embung merupakan hasil sumbangsih warga yang secara suka rela menyerahkan lahannya tanpa dipungut biaya.

“Jadi, lahan untuk embung ini dulunya punya warga? Dia tidak protes? Minta imbalan?” desak salah seorang peserta. Hardianto menekankan bahwa semangat gotong royong dan kepentingan bersama menjadi motivasi warga rela menyerahkan lahannya.

“Kami lihat, ikan arwana juga banyak di sini. Di kolam tidak ada yang curi?” Tanya peserta yang lain. Hardianto menggeleng.

Hal lain yang disorot adalah larangan untuk tidak menangkap katak. Hardianto menerangkan, kebijakan itu diberlakukan tidak sepanjang tahun, hanya di musim awal penanaman sawah. “Kalau orang cari katak di sawah, benih-benih bisa mati diinjak. Kalau sawah sudah tinggi seperti ini, sudah boleh cari katak.”

Sebab perihal katak itu, Suliman Bin Jamahari dari Jabatan Hutan Sarawak memunculkan gagasan. “Kenapa tidak ternak katak saja? Jadi dalam satu kawasan, ada sawah, ada kolam ikan, ada katak. *Three in one!*”

Hardianto tersenyum dan mengangguk-angguk setuju.

Rusda (berbaju dan berjilbab merah), sekretaris Kelompok ICS Karet Desa Mentawt menjelaskan cara penyimpanan karet. Terdapat beberapa perbedaan penting dalam hal tata cara perlakuan terhadap karet antara sebelum dan sesudah adanya ICS (*Internal Control System*).



© WWF-Indonesia / Victor fidelis Sentosa

Peserta *Cross Border Workshop*, didampingi oleh masyarakat Desa Lubuk Antuk, mengunjungi embung desa. Pengelolaan pertanian dan semangat gotong royong menjadi topik diskusi kunjungan ke desa ini.



# WORKSHOP: SALING TUKAR IDE DAN GAGASAN

Hampir semua bangku yang disediakan di dalam GOR Hulu Gurung yang terletak di belakang kantor kecamatan terisi. Kepala atau perwakilan desa yang berada di dalam Kecamatan Hulu Gurung hampir seluruhnya hadir. Sebuah benner terpampang dengan jelas di panggung GOR. Isinya, “Dialog Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengelolaan Alam Secara Lestari, Hulu Gurung, 22 November 2018”.

Susana kegiatan workshop, 23 November 2018. Selain tamu dari Sarawak dan perwakilan desa-desa yang berada di bawah pendampingan WWF, workshop juga dihadiri oleh desa lain yang berada di dalam Kecamatan Hulu Gurung.



© WWF-Indonesia / Victor fidelis Santosa

Tepat pukul 09.00, kegiatan dimulai. Jimmy Syahirsyah dari WWF-Indonesia mengawali pembukaan workshop. Ia bercerita tentang lika-liku kerja sama antara WWF-Indonesia dan Malaysia.

Pada tahun 2016, WWF-Malaysia Sarawak bersama masyarakat lokal dan pemerintah Sarawak Malaysia telah melakukan kunjungan ke Dusun Meliau, Desa Melemba di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum dan Desa Empangau. Mereka secara langsung melihat tata kelola ekowisata dan danau lindung. Dalam kunjungan tersebut, lahir diskusi-diskusi yang bertujuan agar antara WWF-Indonesia dan WWF-Malaysia Sarawak memiliki pemahaman yang sama tentang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, atau yang sering diistilahkan dengan *green economy*.

Setelah kunjungan tersebut, tercatat terjadi beberapa kegiatan lintas perbatasan. Terbaru, Agustus 2018, diwadahi project IKI, WWF-Indonesia bekerja sama dengan WWF-Malaysia membawa beberapa kepala, perwakilan desa di Kecamatan Hulu Gurung dan Kecamatan Empanang, sekaligus camat Hulu Gurung dan perwakilan Bappeda Kapuas Hulu ke beberapa kampung di Sarawak. “Gunanya agar ada pemahaman yang cukup kuat, di tingkat fasilitator dan *community*,” papar Jimmy Syahirsyah.

Penjelasan Jimmy dilengkapi oleh Amanda Nayra dari WWF-Malaysia Sarawak. Ia berharap, project Green Economy IKI di Sarawak dan Kalimantan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di Sarawak sendiri, project green economy dilaksanakan di District Sri Aman dan District Kapit. Di District Sri Aman, khususnya di Menyang Taih, Batang Ai, proyek green economy yang dilaksanakan adalah penanaman pohon gaharu untuk daunnya nanti diproduksi menjadi teh. Sementara di Kapit, masih tahap sosialisasi dan identifikasi. Salah satu cara identifikasi adalah dengan Panda CLICK!, survei potensi dan permasalahan kawasan melalui kamera, adaptasi program WWF-Indonesia Kalimantan Barat.

Kegiatan workshop kali ini dituntut pada diskusi dua arah. Masing-masing desa tempat project IKI dilaksanakan, akan memaparkan proses penguatan green economy di tempat mereka. Begitu pula, pihak rombongan dari Malaysia juga memberi suntikan informasi yang dapat menjadi bahan diskusi.

Dipandu oleh Budi Prasetyo dari Bappeda Kapuas Hulu, pihak rombongan Malaysia terlebih dulu memaparkan kondisi dan program yang dilaksanakan di daerah mereka. Sebelumnya, Kepala Bappeda, H. Abang M. Nasir, S. Sos, menyatakan dukungan pemerintah Kapuas Hulu terkait upaya WWF menggerakkan green economy di KSK Agropolitan.

Menurut Abang M. Nasir, proyek green economy sesuai dengan sistem perencanaan yang dijalankan oleh pemerintah Kapuas Hulu. Ada dua sistem perencanaan, yakni *bottom up planning* (dari bawah ke atas) dan *top down* (dari atas ke bawah). Pendampingan dari WWF memungkinkan masyarakat menyuarakan potensi dan permasalahan di wilayah mereka serta membuat rancangan rencana sendiri. *Bottom up*. Selain itu, gagasan yang lahir dari bawah, jika sesuai dengan kebijakan “di atas”, akan melahirkan tindak lanjut yang tepat sasaran. *Bottom up* dan *top down* artinya bisa sejalan.

“Dari perencanaan yang ada, bupati memiliki visi, menuju Kapuas Hulu yang sejahtera, berdaya saing, harmonis. Untuk mencapai visi itu, ada misi-misi, mencakup peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk misi kedua, kita sedang fokus menciptakan produk unggulan di Kapuas Hulu, misalnya di sektor pertanian. Ada jenis padi yang dinamakan Raja Uncang. Jenis itu tidak bisa ditanam di mana saja. Hanya di Kapuas Hulu bagian utara dan selatan, termasuk di kecamatan ini”, tutur Abang M. Nasir.

Budi Prasetyo menambahkan, dalam mengejar misi-misi tersebut, pemerintah memberikan dukungan pada masyarakat desa, misalnya dengan pembuatan embung. Embung membantu peningkatan hasil pertanian. Dari yang sebelumnya satu hingga dua kali, kini menjadi tiga kali panen. “Konsep KSK Agropolitan adalah masyarakat bisa mengembangkan daerah sesuai dengan potensinya. Pemerintah membantu,” ujar Budi.

Baharudin, Camat Hulu Gurung, menjelaskan visi kebijakan KSK Agropolitan, yang salah satunya berkaitan erat dengan pembangunan berbasis ekonomi hijau. Hulu Gurung merupakan satu di antara tujuh yang berada di KSK Agropolitan.



© WWF-Indonesia / Victor fidelis Santosa

Sementara itu, Camat Hulu Gurung, Baharudin, bercerita tentang proses kemajuan Hulu Gurung. Baharudin merupakan salah seorang peserta rombongan Cross Visit IKI yang melawat ke Sarawak pada Agustus 2018. Ia begitu mengupayakan dapat membalas budi sambutan dan pelayanan baik yang diberikan WWF-Malaysia dan masyarakat selama berada di Sarawak.

“Di Cross Visit IKI Agustus lalu, kami mengunjungi rumah panjang, dan di sana, serasa di rumah sendiri. Serupa di Indonesia. Saya orang yang lahir di sini (Kecamatan Hulu Gurung), dan dulu kita menggunakan sungai (untuk akses). Saat saya di sana (Sarawak), mengunjungi Menyang Taih lewat jalur air, kenangan masa kecil menjadi terasa. Dulu, di sini, di bulan kemarau, kita selalu kekurangan makanan. Baru pada tahun 1984, jalur darat lintas selatan dibuka” cerita Baharudin.

Tahun demi tahun, Kecamatan Hulu Gurung terus berkembang. Visi jauh yang dituju adalah, menuju Kawasan Agropolitan Hulu Gurung Tahun 2034. Saat ini, di Kecamatan Hulu Gurung terdapat 15 desa yang siap untuk mengembangkan potensi masing-masing demi tercapainya visi tersebut.

“Di sini banyak potensi sumber daya alam. 100 persen masyarakat, punya lahan kebun karet. Ini sudah menjadi tradisi sejak zaman kolonial. Zaman belanda, sudah ditanam. Sampai sekarang, menjadi unggulan. Walaupun pekerjaannya sebagai pegawai negeri, mereka tetap punya karet. Pagi-pagi, sebelum kerja, mereka menoreh dulu. Selain karet, masyarakat juga menanam cabai, pisang, durian, nanas”.

Di sektor peternakan, masyarakat di Kecamatan Hulu Gurung juga sedang mengembangkan ayam buras, kambing, ayam potong, dan walet. Di sektor perikanan, mulai marak yang memulai pembibitan ikan nila, patin, budi daya arwana (jenis super red, brazil, dan terbaru, brazil albino). Oleh karena itu, penetapan KSK Agropolitan yang melibatkan Kecamatan Hulu Gurung di dalamnya dianggap sangat tepat dalam sudut pandang Baharudin.

“Belum lama ini, ada kunjungan dari ITB untuk menentukan titik-titik pembangunan yang akan dicapai sampai 2034. Kita merencanakan ada area untuk pakan ikan dan pabrik pengolahan tepung. Semua rencana itu sudah ada dan direncanakan akan tercapai sebelum 2034.”

Satu hal yang menurut Baharudin penting untuk disegerakan adalah, penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). “Tahun 2017, semua desa di Hulu Gurung sudah memiliki BUMDes. Sudah ada rancangan pengembangannya. Penguatan modal, baru dilakukan 2018. Tapi, sudah ada BUMDes yang memiliki simpanan sebesar 100 juta rupiah” ujar Baharudin. Ia lantas menambahkan bahwa jika BUMDes berkembang, masyarakat bisa mandiri.

“Ada juga BUMDes bersama (milik beberapa desa). Ada BUMDes sekecamatan. Kita sudah punya dana 997 juta”.

Usai presentasi dari Baharudin, pihak rombongan Malaysia pun berkesempatan untuk mendedahkan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang mereka galakan. Suliman Bin Jamahari (Jabatan Hutan Sarawak) dan Manggat (Tuai Rumah Panjang Menyag Taih) maju ke hadapan khalayak. Mereka saling mengisi menceritakan proyek penanaman gaharu.

Suliman berkisah tentang proyek penanaman pohon gaharu di Ulu Menyag, yang di sana bermukim masyarakat iban Rumah Panjang Menyag Taih. Masyarakat, didampingi oleh WWF-Malaysia Sarawak melalui projek IKI, dan Perusahaan Aquilaria Plantation, mengembangkan jenis gaharu yang dapat diolah daunnya menjadi teh gaharu.

Penanaman gaharu awalnya merupakan inisiasi dari Jabatan Hutan Sarawak, dimulakan sejak tahun 2013. Saat ini, telah tertanam 11.000 benih gaharu, dan hanya memanfaatkan 6 ha lahan. Luas demikian, tidak lebih dari satu persen dari luas total kawasan konservasi Ulu Menyag. Tepatnya, hanya 0.0004% dari total 14,000 hektar luasan Konservasi Ulu Menyag Area.

Tahun 2017, WWF-Malaysia Sarawak ikut mendukung kegiatan penanaman gaharu. Jenis gaharu yang ditanam adalah *Aquilaria microcarpa*. Jenis ini, dapat dipanen sebelum masuk usia lima tahun. Dilihat dari nilai pasar, harga teh gaharu termasuk cukup stabil. Setiap kilogram daun segar, dihargai dengan enam ringgit. Satu hektar dapat berisi 800 pohon, dan setiap hektar dengan pohon-pohon berusia 2 hingga 3 tahun, mampu menghasilkan 250-300 kilogram daun segar. Artinya, dalam satu hektar, bisa didapat sekitar 1.500-1.800 ringgit. Sebagai bonus, sepuluh persen kebun, disisihkan untuk inokulasi bagi produksi parfum gaharu.

Tujuan proyek gaharu ini jelas, yakni konservasi biodiversiti, mengenalkan sumber ekonomi yang berkelanjutan kepada masyarakat, menjamin pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, menekan deforestasi, meningkatkan ekonomi masyarakat melalui produk teh gaharu, mengimplementasikan bisnis berbasis konservasi di Sarawak, dan menstimulasi perkebunan bertema wisata.

Untuk menyukseskan kegiatan, penanaman bibit gaharu membutuhkan banyak orang. Mengandalkan warga Rumah Panjang Menyang Taih saja tidak cukup. Untuk itu, WWF-Malaysia, Jabatan Hutan Sarawak, dan Aquilaria Plantation mengundang berbagai komunitas dari Kuching bahkan luar Sarawak. Gelombang pertama digratiskan. Gelombang selanjutnya, dikenakan biaya akomodasi. Hebatnya, meski dikenakan biaya, tetap saja berduyun-duyun orang menawarkan diri untuk terlibat dalam kegiatan penanaman gaharu.

“Jadi, kami mendapat gagasan baru. *Spin off form gaharu-themed tourism product*. Kebun gaharu bisa menjadi objek wisata,” tutur Suliman. Di akhir cerita, Suliman ‘membacakan’ puisi yang ia namai “puisi sepi”. Puisi tersebut tanpa adalah puisi tanpa kata-kata. Suliman Bin Jamahari bermaksud mengingatkan hadirin. “Itulah jadinya jika alam tidak diisi dengan kicauan burung, riak sungai. Sepi. Semacam rumah hantu”.

Albertus Tjiu, Direktur WWF-Indonesia Kalimantan Barat, memaparkan gagasan bahwa kerja sama lntas negara dalam ekonomi hijau, khususnya di bidang pengelolaan gaharu, sangat potensial untuk dikembangkan ke depannya.



© WWF-Indonesia / Victor fidelis Santosa

Tanya jawab lalu dimulai. Albertus Tjiu dari WWF-Indonesia Kalimantan Barat bertanya, apakah ada kemungkinan Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, turut serta dalam menyuplai kebutuhan gaharu di Malaysia, yang tentunya harus melalui uji coba standar terlebih dahulu. “Gaharu bisa dibidang inisiatif *green economy* yang berhubungan dengan hasil hutan bukan kayu (HHBK).”

Kepala Bappeda Kapuas Hulu, Abang M. Nasir bertanya tentang kandungan teh gaharu dan manfaat yang bisa didapat dari meminumnya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut direspon oleh Suliman. Tidak menutup kemungkinan Kalimantan Barat juga menjadi pemasok daun gaharu. Hanya saja, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. “Daun ini mesti diproses dalam tempo 24 jam, sedangkan pabrik kami ada di Kuching. Bisakah kita menjamin jarak tempuh Putussibau-Kuching kurang dari satu hari? Berapa ongkosnya? Jadi, ada dua opsi. Bikin kilang di sini atau antar cepat”.

Sulaimani menambahkan, “Mungkin kita berdiskusi tentang ini lebih sering. Tidak ada yang mustahil. Contohnya, craft tangan dari Kalimantan sudah bisa ekspor ke Kuching.”

Mengenai kandungan gaharu, Sulaimani menjawab, “Daun gaharu punya banyak manfaat. Untuk membuat toksin. Awet muda. Menstabilkan gula darah. Mayoritas konsumen yang beli adalah pengidap kencing manis.”

Ia tidak mengelak bahwa harga untuk teh gaharu termasuk mahal. “120 ringgit untuk satu pack. Tapi orang kaya, banyak yang beli. Persediaan selalu habis.”

Acara rehat sejenak di tengah hari. Para peserta dan rombongan saling berbaur untuk menyantap hidangan ikan nila goreng yang tersedia sebagai menu makan siang. Sekitar pukul 13.30, acara kembali dimulai, kali ini dengan Jimmy Syahirsyah bertindak sebagai moderator. Secara bergantian, Mardiono (Kepala Desa Mentawit), Hardianto (Kepala Desa Lubuk Antuk), Hasanudin Lasah (Kepala Desa Miau Merah), dan Fransiskus Kunyang (Kepala Dusun Sebangkang, Desa Lajak Sandang), mengisi bangku pembicara. Mereka menjabarkan proyek green economy binaan WWF-Indonesia Kalimantan Barat di kawasan masing-masing.

Mardiono bercerita tentang potensi karet desanya. Karet di Desa mentawit merupakan karet lokal dan setiap kepala keluarga setidaknya memiliki 1-2 hektar kebun karet. Halangan pengembangan karet adalah harga. “Jika di atas 10.000, maka masyarakat terbantu. Jika di bawah 5000, merupakan hal yang buruk”, paparnya.

Tahun 2018, bulan Februari, WWF melalui program IKI, melakukan sosialisasi ke Desa mentawit untuk mengembangkan bokar (bahan olahan karet) bersih melalui *Internal Control System* (ICS). Sosialisasi itu awalnya tidak ditanggapi dengan baik oleh masyarakat. Bahkan, ada selentingan yang menganggap WWF bermaksud menguasai lahan yang ada di desa.

Beruntung, jajaran pemerintah membantu sosialisasi WWF. Mereka melihat tawaran WWF sebagai salah satu cara membantu peningkatan perekonomian desa melalui optimalisasi kebun karet. Setelah beberapa kali sosialisasi, akhirnya, ada yang terlibat. Di tahap awal, jumlah masyarakat yang ikut ICS hanya 18 orang. Sosialisasi terus digalakkan dan sekarang ada 86 orang. Mereka dibagi dalam 4 kelompok. Dalam 1 kelompok terdapat 21 anggota.

“Selama ini, masyarakat menggunakan cara tradisional. Hasil panen karet ditampung dengan cara direndam dalam air bak. Kenapa karet rendah? karena basah dan kotor. Kenapa produksi sedikit? karena cara menorah tidak benar. Kenapa banyak penyakit di karet? Karena perawatan kurang” ujar Mardiono. “Di dalam ICS, kita dibimbing untuk memproduksi karet yang sesuai standar, yang mudah-mudahan mampu meningkatkan daya jual”.

Meski dalam tahap awal, Mardiono optimis harapan yang diusung melalui ICS dapat tercapai. Rencana-rencana ke depannya sudah dipersiapkan, melingkupi pelatihan budaya karet, kunjungan belajar budidaya karet, dan membuka peluang pasar.

Lewat ICS, perlahan-lahan masyarakat Desa Mentawit mulai mengerti inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas bokar dan melakukan sistem pengawasan. Di internal ICS, telah terjadi pembicaraan untuk pembibitan, pola kebun, penyadapan, pemanenan, pengolahan hasil panen, hingga penjualan.

Sementara itu, Kepala Desa Lubuk Antuk, Hardianto memperkenalkan kondisi pertanian desanya. Pertanian memang menjadi basis dalam pengelolaan desa. Hal ini telah dilakukan sejak dahulu, dengan beberapa perbedaan cara berladang.

“Tahun 1971, masyarakat berpindah dari berladang liar ke ladang tetap. Dari tahun 1980, sampai 1991, dimulai sistem pertanian menetap seiring dengan munculnya peraturan desa tentang Bukit Beluan. Tidak boleh bertanam di bukit. Jika membantah, dikenakan denda 10 real emas” cerita Hardianto.

Tahun 1991 sampai 1999, terjadi transisi cara bertani. Bantuan berupa traktor didapat dari pemerintah. Alat perontok padi juga ada. Lubuk Antuk mendapat perhatian khusus. Bibit-bibit terbaik dicoba ditanam. Yang paling berhasil adalah jenis Raja Uncang. Kini, sebagian besar masyarakat dapat melakukan panen tiga kali dalam setahun.

Selanjutnya, Hasanudin Lasah, Kepala Desa Miau Merah, memaparkan tentang keadaan perkebunan sawit mandiri di desanya. Sejak perkebunan sawit menjadi populer di Kalimantan Barat, tidak sedikit masyarakat yang menanam tanaman industri tersebut. Sayangnya, mereka bekerja sendiri-sendiri. Tidak ada kelompok yang teroganisir. Hal ini menyebabkan biaya produksi harus ditanggung secara personal, yang tentunya lebih besar dibanding jika berkelompok.

Karena itu, ICS Sawit Mandiri yang didampingi oleh WWF mengawali kegiatan dengan membentuk Kelompok Tani Sawit Mandiri. Tanggal resmi kelompok itu berdiri ialah 26 Oktober 2018. Tujuan pembentukan kelompok tersebut ialah untuk meningkatkan perekonomian anggota.

Saat ini, Kelompok Tani Sawit Mandiri beranggotakan 20 orang dan memiliki luas lahan sekitar 50 hektar, total dari jumlah lahan personal anggotanya. Mereka telah melakukan beberapa kegiatan terkait tata kelola kelompok dan pelatihan teknis pengelolaan kelapa sawit. Terbaru, mereka melakukan kunjungan belajar ke Desa Merarai, salah satu desa di Kabupaten Sintang yang memiliki koperasi sawit yang cukup maju. Tahun 2019, Kelompok Tani Sawit Mandiri mengagendakan pelatihan inspektor ICS sawit, pendataan petani dan pemetaan kebun, dan implemetasi ICS sawit.

Menanggapi kegiatan sawit mandiri, Suliman Bin Jamahari menyatakan bahwa para petani sawit memang rentan terhadap fluktuasi harga. “Saya juga menanam sawit. Saya punya sekitar 10 hektar, dimulai sejak tahun 2008. Tidak pernah dari saya tengok harga sangat menguntungkan. Saya pikir sawit bukan komoditi yang menguntungkan. 30 sen untuk per kilo. *Cost* tinggi, terutama untuk pupuk dan racun. Banyak kawan saya yang berhenti di tengah jalan.”

Hasanudin Lasah kemudian merespon bahwa perkebunan sawit di Miau Merah dihadapkan oleh persoalan yang sama. “Kalau kita lihat setiap tahun, harga memang turun naik, tidak stabil. Pada saat naik, jika luasan lahan 2 ha, penghasilan untuk umur 5 tahun kurang lebih 1 juta per bulan.” Meski demikian, ada nada optimis dalam jawabannya. “Kalau harga stabil, memang cukup menjanjikan. Karena itu ICS penting. Mudah-mudahan, melalui sistem yang terkontrol, dari pemilihan bibit, penanaman, harga bisa ikut terkontrol.”

Adri Aliyub dari WWF-Indonesia Kalimantan Barat membantu menjelaskan tentang ICS sawit. “ICS merujuk pada standar perkebunan sawit yang ada di Indonesia, ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). Pendampingan sawit bertujuan membantu petani yang sudah menanam sawit, bukan mendukung penanaman sawit, supaya mereka dapat mengembangkan kebun yang baik, sesuai dengan aturan.”

Presentasi terakhir disampaikan oleh Fransiskus Kunyang. Di Lajak Sandang, penggunaan lahan masyarakat terbagi dalam beberapa kategori, yakni wilayah pertanian, perkebunan, pemukiman, hutan, dan tembawang. Di sektor pertanian, masyarakat masih menerapkan pola ladang berpindah, pengelolaan dengan sistem adat, dan hasil panen dimanfaatkan untuk diri sendiri (mayoritas tidak dijual). Di sektor perkebunan, banyak masyarakat yang menanam sawit, lada, dan karet.

Hal penting yang dapat disorot dari desa yang terletak di Kecamatan Empanang ini adalah peran masyarakat untuk melindungi kawasan hutan. Sebagian besar wilayah Desa Lajak Sandang merupakan area konsesi sawit. Walaupun demikian, masyarakat tidak memperbolehkan area-area tertentu, terutama di perbukitan, untuk dialihfungsikan. Hutan di perbukitan tetap mereka jaga. Salah satu motivasi mereka mempertahankan hutan ialah karena masyarakat secara langsung mendapat manfaat jasa lingkungan, terutama air bersih.

Secara gotong royong, masyarakat patungan membuat pipa untuk mengalirkan air ke rumah panjang. “Dari pada menunggu pemerintah membuat pipa air, lebih baik melakukannya sendiri” tutur Kunyang. “Kami jaga hutan supaya jaga air. Di Dusun Sebangkang, 80 persen hutan masih sangat bagus. Semua ladang, ada airnya. Kami jaga air di sana”

Lewat WWF dengan proyek green economy IKI, Fransiskus Kunyang dan masyarakat lain berencana mendorong penanaman tanaman bernilai ekonomis seperti jengkol, petai, langsung, tengkawang, kopi. Tujuannya, agar tidak lain adalah agar pendapatan masyarakat bisa berkembang.



© WWF-Indonesia / Victor Idelias Sentosa

Peserta dari Sarawak, memerhatikan dengan serius presentasi para perwakilan desa. Materi pemaparan tidak hanya menyangkut potensi dan kegiatan ekonomi hijau, namun juga regulasi dan permasalahan.

Sebagaimana sesi sebelumnya, usai pemaparan, kegiatan diskusi segera dilakukan. Suliman mengemukakan gagasan tentang perlunya ada tanaman lain yang bisa dibudidayakan di sela-sela pohon karet. “Jarak tanam antar karet saya pikir cukup renggang. Bisa ditanam sesuatu. Boleh juga dikembangkan madu kelulut. Dari pada rumput-rumput saja yang tumbuh”.

Mardiono, Kepala Desa Mentawit, menerangkan tentang potensi karet di desanya, dan pentingnya pembinaan tenaga ahli dan berpengalaman untuk meningkatkan kualitas produk karet serta kesejahteraan petani.



© WWF-Indonesia / Victor fidelis Sentosa

Mardiono mengiyakan gagasan Suliman Bin Jamahari. “Memang ada keinginan kami untuk tumpang sari, untuk kebun yang lain. Misalnya, kopi. Tapi perlu juga dikaji dan bimbingan dari kawan-kawan yang lain”.

Mohamad Syafiq (*District Office Lubok Antu Sarawak*) mengemukakan pendapatnya bahwa Lubok Antuk memiliki potensi besar untuk menjadi sumber tenaga listrik terbarukan (mikrohidro). Ia juga bertanya tentang bagaimana cara mendapatkan data penduduk secara akurat, sebab setiap kepala atau perwakilan desa selalu membuka presentasi dengan data monografi penduduk.

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Hardianto. Jika hanya mengandalkan dana desa, sumber dana tentu tidak bisa mencukupi untuk membangun mikrohidro. Pengajuan pengadaan mikrohidro melalui proses yang panjang. “Kami menentukan suatu bangunan dengan hasil musyawarah masyarakat. Saat ini, mikrohidro belum benar-benar dibutuhkan desa”, terang Hardianto.

Mengenai sensus penduduk, Hardianto menjelaskan bahwa setiap bulan, setiap desa harus melaporkan ke kecamatan tentang perubahan penduduk. “Yang lahir, yang meninggal, dilaporkan semua”.

Elvis (*District Office Kapit*) bertanya tentang batas-batas otonomi desa dalam pembangunan. “Ada usaha-usaha yang dimiliki oleh individu, apakah desa mendapat pendapatan dari usaha-usaha itu? Lalu, adakah desa diberikan otonomi sepenuhnya atau ada batas-batas tertentu?”

Selain bertanya, Elvis juga sekali lagi mengemukakan kekagumannya terhadap jiwa sosial dan solidaritas masyarakat desa. Tidak ada kasus pencurian ikan arwana walaupun kolam arwana hanya dibatasi oleh seng setinggi setengah meter.

Begitu pula proses pembangunan embung yang sebelumnya merupakan lahan masyarakat. Masyarakat menyerahkan lahan mereka dengan suka rela demi kepentingan orang banyak.

Kepala Bappeda Kapuas Hulu Abang M. Nasir membantu mengisi jawaban kepala-kepala desa. “Ada regulasi yang mengatur tentang Dana Desa. Tahun 2018, ditetapkan 4 hal prioritas yang harus diatur DD, yakni Program Unggulan Kawasan Pedesaan, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), embung, serta fasilitas olahraga. Kenapa tidak infrastruktur? Pemerintah pusat sudah menganggap cukup.”

Tentang solidaritas warga, Hardianto menjawab, “Semangat kekeluargaan di sini. Musuhnya hanya satu, pendatang dan berang-berang. Tetapi, memang nantinya harus ada sistem yang mengantisipasi kejahatan pencuiran ikan.”

Baharudin menambahkan, bahwa masyarakat umumnya sadar, fasilitas umum akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi, mereka bertekad, infrastruktur menjadi milik mereka, walaupun yang membangun adalah provinsi atau kontraktor. “Lagipula, lahan individu tergolong banyak. Ada yang sampai 10 hektar. Berkurang sedikit, tidak menjadi persoalan”.

Sore menjelang. Lewat pukul 17.00, meski masih banyak yang hendak didiskusikan, kegiatan harus diakhiri. Oleh Jimmy Syahirsyah, berbagai pihak diminta tanggapan dan komitmennya terhadap komunikasi antar dua negara dalam mengembangkan kegiatan ekonomi hijau, ekonomi yang ramah lingkungan.

Adri Aliyub, Community Development WWF-Indonesia Kalimantan Barat, menyarankan agar ada pertemuan yang intens, dan setiap pertemuan, kualitas pembicaraan terus ditingkatkan. “Pertemuan selanjutnya, harus ada diskusi grup dua arah” paparnya.

Elisabeth Wetik, Stakeholder Engagement and Program Facilitator Officer HoB, menyarankan adanya grup online untuk diskusi, beranggotakan WWF, pemerintah, dan masyarakat dari Indonesia dan Malaysia.

Madeline dari Jabatan Hutan Sarawak merespon positif kegiatan di hari ini. “Dari pihak kerajaan, bisa membuat apa yang menjadi keperluan masyarakat. Dari segi peningkatan taraf hidup. Kami akan menjadi fasilitator. Misalnya kita akan selalu koordinasi dengan jabatan-jabatan lain jika memang punya korelasi dengan program-program kerajaan”.

Lo Sheau Sia, dari State Planning Unit Sarawak, menyambut baik adanya diskusi langsung seperti ini. Dalam sudut pandangnya, diskusi-diskusi yang melibatkan langsung masyarakat desa akan membantu perencanaan yang tepat sasaran. “Office (kantor) kami selalu memikirkan perubahan luar bandar (kota). Salah satu aktivitas kami ialah pembangunan infrastruktur asas (dasar) seperti air, listrik, dan jalan raya. Kerajaan juga memperkenalkan *economy activity*, agar ada peningkatan ekonomi di luar bandar. Proyek ini dilaksanakan dengan dibantu pihak NGO seperti WWF. Kerajaan punya kekurangan SDM dan intelektual. Program seperti ini sangat bagus.

Suliman dari Jabatan Hutan Sarawak sangat mendukung kegiatan diskusi yang diadakan WWF ini. “Pintu akan terbuka untuk menggapai segala kejayaan yang ada di hadapan kita. Siapa tahu, beberapa tahun nanti kita bertemu sudah dengan membawa mobil Pazeru Sport” candanya.

Mohamad Syafiq dari District Office Lubuk Antu berharap agar kepala kampung yang berada di kawasannya bisa belajar dalam lawatan ini, dan pulang ke Sawarak untuk berubah menjadi lebih baik.

Lalu, Elvis dari District Office Kapit mengaku banyak belajar dari kunjungan ini. “Bagi saya selaku orang di pemerintah daerah, kepala desa punya peran sentral. Ia mestilah orang yang punya visi sendiri, tanpa bergantung pada pemertintah. Saya lebih suka melihat desa yang independen dari segi ide, usaha, pelaksanaan. Tidak semua memang bisa dilaksanakan dengan dana yang ada, tetapi bisa diusahakan untuk ditambah. Masyarakat bisa melakukannya. Ini saya pikiran contoh yang baik, dan saya pikir, kepala desa di sini punya semangat memajukan desa dengan semangat kebersamaan”.

Terakhir, Hardianto mewakili kepala-kepala desa dan Baharudin, Camat Hulu Gurung, menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan dalam pelayanan selama kunjungan. Mereka bersyukur bisa menjadi tuan rumah dan berharap pemikiran dalam rangka mencapai kemakmuran dapat selalu dibagikan. Batas negara hanya batas administrasi. Kebaikan tidak kenal batas.

“Kami memandang, satu hari ini sangat singkat untuk berbincang tentang pembangunan. Terima kasih kepada saudara-saudara kami dari Malaysia yang sudah memberikan masukan. Tentu ini merupakan modal bagi kita untuk program yang lebih baik. Dan mudah mudahan kita bisa terus berkomunikasi lewat teknologi yang ada,” tutur Baharudin.



Foto bersama dan penyerahan cendera mata usai workshop. Dari kiri: Albertus Tjiu (WWF-Indonesia Kalimantan Barat), Samantha Liem (WWF-Malaysia Sarawak), Elvis (Kapit District Office), Baharudin (Camat Hulu Gurung), H. Abang M. Nasir, dan Budi Prasetyo (Bappeda Kapuas Hulu).

© WWF-Indonesia / Victor fidalis Sentosa

# BERBAGI KISAH DENGAN BUPATI

Sejak pukul 09.00, tanggal 23 November 2018, rombongan meninggalkan Tepuai Hulu Gurung. Baharudin, Camat Hulu Gurung, ikut mengantarkan hingga ke Putussibau. Ia mengusulkan untuk singgah sejenak di tempat rekreasi air terjun Medang Pulang, terletak sekitar setengah jam dari Tepuai. Usulan tersebut diterima.

Dari sekian banyak air terjun yang berada di Kecamatan Kapuas Hulu, Medang Pulang memiliki keunikan tersendiri karena airnya yang berwarna merah. Sebutan Medang Pulang diambil dari “Medang” yang merupakan nama jenis kayu lokal yang tumbuh di tebing sungai, menjorok masuk ke dalam air, dan mencuat melengkung lagi ke atas dari permukaan air. Tumbuhan ini bisa dilihat di sekitar air terjun. Sementara “Pulang”, berarti ‘kembali ke tempat asal’.

Setibanya di lokasi, setiap anggota berusaha mengabadikan momen keberadaan mereka di sana. Sayangnya, tidak banyak waktu untuk singgah, sehingga tidak ada kesempatan untuk mandi bersuka ria. Setengah jam berada di Medang Pulang, rombongan melanjutkan perjalanan dan tiba di Putussibau pukul 02.00. Di Rumah Makan Fajar, makan siang yang tertunda dilampiaskan dengan begitu bersemangat.

AM Natsir, Bupati Kapuas Hulu (berbaju merah) merespon baik kegiatan Cross Border Workshop. Ia mengharapkan terjalannya kerja sama yang intens antara Sarawak dan Kalimantan Barat, khususnya terkait pengembangan ekonomi hijau.



© WWF-Indonesia / Victor fidelis Santosa

Malam hari, rombongan lalu menuju pendopo Bupati Kapuas Hulu yang terletak langsung berhadapan dengan Sungai Kapuas. Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero, menyambut kedatangan rombongan. Sambil menunggu kehadiran Bupati, rombongan disugahi berbagai panganan khas Kapuas Hulu, terutama kerupuk basah.

A.M Nasir, S.H, sang bupati, akhirnya tiba. Ia menggunakan kemeja merah bercorak Dayak. Beberapa perwakilan rombongan menyalaminya. Dengan senyum ramah, bupati meminta setiap rombongan menempati bangku yang mengelilingi meja besar.

H. Abang M. Nasir, S.Sos, Kepala Bappeda, yang memiliki nama mirip dengan bupati, menyampaikan laporan kegiatan. Selama dua hari, Kepala Bappeda terjun langsung mendampingi rombongan. Karena itu, dengan lancar dirinya bercerita tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Tepuai, Hulu Gurung, dari kedatangan hingga kepulangan.

“Ada dua diskusi yang dilakukan, yakni ekowisata dan pengembangan green ekonomi di KSK Agropoltian. Kita membahas bagaimana pengembangan ekowisata di Sarawak dan Indonesia, juga membahas pengembangan ekonomi di KSK Agropolitan”.

Kepala Bappeda menyoroti potensi-potensi wisata yang dimiliki oleh Kapuas Hulu. Ia beranggapan, bukan hal yang mustahil, bila terjadi kerja sama antara pelaku wisata di Kapuas Hulu dan Sarawak akan ada paket wisata bersama. “Di sini, selain Danau Sentarum, kita juga bisa kembangkan wisata alam dan rohani seperti Tilung. Ada keterkaitan kulutral antara Indonesia dan Malaysia”.

Di sisi pengembangan agropolitan, Kepala Bappeda menyampaikan ketertarikan rombongan Sarawak terhadap sistem kawasan strategis kabupaten. “Penetapan KSK sesuai tata rencana usaha. Masyarakat sudah ada usaha mandiri. Desa Miau Merah mengembangkan sawit mandiri. Di Kecamatan Hulu Gurung, beberapa desa sudah mampu mengelola pertanian secara mandiri. Di beberapa tempat lain, perkebunan rakyat juga dikembangkan”.

Tentang penanaman gaharu yang didapat dari kisah Jabatan Hutan Sarawak, WWF-Malaysia Sarawak, pihak swasta, di Kawasan Konservasi Ulu Menyang juga diceritakan. “Pokok gaharu ini ditanam bukan untuk diambil pohonnya, tetapi 70 persen untuk dimanfaatkan daunnya, dan ini menjadi komoditas mahal. Bukan tidak mustahil kita belajar tentang pengelolaan daun gaharu ke Sarawak”.

Elvis kemudian mewakili rombongan Sarawak menyampaikan kesan-kesan selama kunjungan. Kalimat-kalimat awalnya, dipenuhi oleh rasa terima kasih. “Saya mewakili rombongan menyatakan bahwa kami terasa sangat dihargai. Sepanjang lawatan, banyak perkara yang kami pelajari. Kami melawat langsung ke kebun karet dan sawah pertanian”.

Elvis lantas bercerita sejenak tentang masa mudanya. “Saya lahir dari keluarga penoreh. Jadi, sudah biasa dengan kondisi petani karet. Saya juga pelajari embung dan bagaimana masyarakat dapat suka rela menyerahkan lahan untuk embung. Begitu juga, saya tertarik dengan tanaman padi yang bisa tiga kali panen. Yang saya cukup heran, masyarakat bisa juga memelihara ikan arwana. Di Kapit, kami ada kawasan seperti ini, tetapi tidak pernah terpikir untuk dijadikan lahan pemeliharaan arwana”.

Kekaguman Elvis terus berlanjut. Ia terpujau dengan semangat gotong royong masyarakat desa. “Ini menunjukkan kebersatuan dari masyarakat kampung. Pengalaman ini sangat berharga bagi kami. Banyak lagi perkara yang ingin kami pelajari. Kami merasakan, hubungan seperti ini, tidak harus padam. Esok kita akan berpisah, tetapi tidak seharusnya menjadi titik akhir” pungkasnya.

A.M Nasir, Bupati Kapuas Hulu (berbaju merah), menerima cendera mata dari peserta *Cross Border Workshop*, diwakili oleh Elvis.



© WWF-Indonesia / Victor fidelis Santosa

Sebagai kenang-kenangan, rombongan Sarawak kemudian menyerahkan beberapa buku kepada bupati, begitu pun sebaliknya.

A.M. Nasir, S.H, Bupati Kapuas Hulu, selanjutnya menyampaikan sambutan. Sejenak ia bercerita tentang kondisi wilayah Kapuas Hulu, bahwa Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, bahwa jumlah penduduk Kapuas Hulu mencapai 200.000 lebih jiwa, bahwa terdapat 23 kecamatan yang terdiri dari 278 desa dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani.

“Yang masuk dalam HoB, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Kapuas Hulu 100 persen masuk di dalam HoB. Jantung memiliki peran yang sangat penting. Tinggal bagaimana tiga negara membuat suatu program ke depan dan ini perlu dialog yang cukup panjang”, ujarnya.

Bupati menyoroti kemajuan infrastruktur di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, membuat akses darat dari Indonesia ke atau dari Malaysia, menjadi lebih mudah. “Pos lintas batas juga bagus. Hanya memang, untuk urusan perdagangan Malaysia-Indonesia, walau kita berhadapan, kebijakannya tetap di tangan pemerintah pusat”.

Forum Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia) menjadi salah satu harapan pemegang kebijakan di daerah untuk meningkatkan intensitas kerja sama, terutama bagi masyarakat yang berada di perbatasan. “Kendala yang kami sampaikan, selalu sama dalam tiap Forum Sosek Malindo, tentang masuk-keluar kendaraan. Jangan buat susah orang mau berkunjung ke sini (Kapuas Hulu)”, tutur bupati.

Dengan akses yang mudah, bupati percaya bahwa banyak sektor yang bisa ditingkatkan. “Soal pariwisata dan perdagangan antarnegara”, tuturnya. “Kedua sektor itu bisa mengangkat potensi kedua daerah”.

Banyak hal yang bisa didorong untuk membangun kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, Sarawak dan Kalimantan Barat. Bupati berpendapat, HoB dapat menjadi wadah kerja terjalannya kerja sama yang intens tersebut. “Tadi saya sampaikan, HoB adalah jantung borneo. Bagaimana kita bisa membuat program yang bagus yang berguna bagi masyarakat dan lingkungan kita”



Foto bersama setelah acara ramah tamah di rumah dinas bupati, diikuti oleh peserta *Cross Border Workshop*, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, WWF-Indonesia Kalimantan Barat, dan WWF-Malaysia Sarawak

“Yang jelas, yang paling penting, untuk sekarang silaturahmi harus dijaga. Mudah-mudahan ke depan, komunikasi bisa berjalan dengan baik sehingga bisa membawa kebiakan untuk tiga negara yang ada di dalam HoB” tutup Bupati.

Silaturahmi dengan bupati berakhir pukul setengah sepuluh malam. Pertemuan ini juga menjadi akhir dari agenda *Cross Border Workshop* selama tiga hari.



© WWF-Indonesia / Victor fidelis Sentosa

# LANGKAH DI HADAPAN

Semua rombongan kembali ke Pontianak pada tanggal 24 November 2018, menginap semalam di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat tersebut, bertamasya di Sungai Kapuas atau pasar, lalu terbang ke Kuching pada pagi hari tanggal 25 November 2018.

Para peserta *Cross Border Workshop* bersiap-siap untuk check-in di Bandara Pangsuma, Putussibau. Kegiatan berakhir pada tanggal 24 November 2018.



© WWF-Indonesia / Victor Idris Sentosa

Semua orang, dari WWF, pemerintah, maupun masyarakat, dari Indonesia maupun Malaysia, tidak mau kegiatan *Cross Border Workshop* yang penuh arti ini menguap begitu saja. Grup online yang berisikan para peserta *Cross Border Workshop* langsung dibuat. Hal-hal kecil mulai mengisi grup online tersebut.

Terpenting, adalah implementasi dari ide, gagasan, dan masukan yang dihasilkan dalam workshop. Terkait green economy, semua pihak diharapkan dapat secara optimal dan bersinergi dalam mengimplementasikan konsep green economy di lokasi masing-masing. Hal ini juga menjadi bagian dari pembangunan lintas batas secara integral dan terintegrasi.

Hal ini tidak berbeda dengan hasil yang diharapkan dari workshop ekowisata, yakni tindakan lanjutan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik ekowisata lintas batas berbasiskan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam.

Dikaitkan dengan pengelolaan HoB sebagai lanskap bersama, workshop green economy dan ekowisata mendukung pembangunan Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi yang berada di dalam kawasan HoB.

Jalan ke arah sana mungkin tidak sebentar dan tidak mudah. Tetapi, *Cross Border Workshop* telah menunjukkan bahwa sinergi setiap pihak, dari level atas hingga bawah, dari pemerintah hingga swasta, dari Indonesia atau Malaysia, bisa terbentuk dengan baik. Saling bersinergi dan mendukung, kedua hal tersebut merupakan modal besar ketika mengayun langkah bersama; meniti kesinambungan pembangunan yang menguntungkan manusia sekaligus merawat alam.



Mengisi waktu jeda, para peserta mengunjungi masjid tertua di Pontianak, Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, sambil meniti Sungai Kapuas. Esok harinya, 25 November 2018, mereka kembali ke Sarawak

# WWF-Indonesia in numbers

## FACEBOOK

facebook.com/wwfmy  
facebook.com/WWFIndonesia

## WEBSITE

wwf.org.my  
wwf.id  
globallandusechange.org



## TWITTER

twitter.com/wwfmy  
twitter.com/wwf\_id

Supported by:



Federal Ministry for the  
Environment, Nature Conservation,  
Building and Nuclear Safety



### Why we are here

To stop the degradation of the planet's natural environment and to build a future in which human live in harmony with nature.

**WWF-Indonesia** (West Kalimantan Programme)  
Pontianak Office. Jl. Karna Sosial Gg. Wonoyoso II, No 3  
Pontianak, 78121 Kalimantan Barat, Indonesia  
Email: Isyafitri@wwf.id

**WWF-Malaysia** (Sarawak Conservation Programme)  
7th Floor, Bangunan Binamas, Jalan Padungan, 93100 Kuching,  
Sarawak, Malaysia  
Email: comms.asst@wwf.org.my